Portalnya Dunia Usaha

INDOLINE

www.INvestorDailyOnLINE.com

JUMAT, 13 NOVEMBER 2026 — KEMENTERIAN KOMDIGI RI NO.TDPSE 030252.01/DJAI.PSE/11/2026 — EDISI e-PAPER 2026 - 015

RUPSLB IDEA Setujui Pengambilalihan 66,58% Saham oleh Nawasena Nugra Investama

Jakarta, InvestorDaily-Online.com – Perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi (non-formal), pelatihan sumber daya manusia, serta pengelolaan industri jasa *hospitality*/perhotelan dan pariwisata, PT Idea Indonesia Akademi Tbk (IDEA) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu (12/11/2026).

Dalam RUPSLB tersebut, disepakati tiga mata acara, yaitu persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, penegasan atas susunan pemegang saham perseroan, dan persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI).

Terkait dengan mata acara pertama, disepakati persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baru yang disetujui:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Yukki Nugrahawan Hanafi
- Komisaris: Achmad Gamaludin M
- Komisaris Independen: Dimas Kahlil Sudoyo Beck
- Komisaris Independen: Wendy Isnandar
- Komisaris: Ahmad Rafi Ashrafusadat

Direksi

- Direktur Utama: Otto Ardianto
- Direktur: Mochamad Riandri Prasetya
- Direktur: Saskia Ayu Ajeng Aditya Putri
- Direktur: Eko Desriyanti
- Direktur: Dody Arifianto



Dok. IDEA

Komisaris Utama IDEA Yukki Nugrahawan Hanafi (lima dari kanan) bersama jajaran direksi dan komisaris foto bersama usai RUPSLB di Jakarta.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengambilalihan sebanyak 707.322.700 saham Perseroan atau setara dengan 66,58% dari total modal ditempatkan dan disetor oleh PT Nawasena Nugra Investama (Nawasena).

Transaksi pengambilalihan saham tersebut memiliki nilai sekitar Rp38 miliar, dengan harga transaksi sebesar Rp53,73 per saham. Persetujuan RUPSLB ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengambilalihan kepemilikan mayoritas IDEA oleh Nawasena.

Direktur Corporate Affairs PT Idea Indonesia Akademi Tbk, Saskia Ayu Ajeng Aditya Putri, menyampaikan apresiasi atas persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham IDEA melalui RUPSLB tersebut.

"RUPSLB telah menyetujui transaksi pengambilalihan saham PT Idea Akademi Tbk oleh Nawasena. Persetujuan ini merupakan langkah penting dalam proses pengambilalihan kepemilikan saham mayoritas Perseroan. Kami menghargai kepercayaan dan dukungan para pemegang saham terhadap pelaksanaan transaksi ini," ujar Saskia.

Nawasena menggarisbawahi fokus strategis perusahaan melalui proses pengambilalihan ini.

"Bagi kami, langkah ini membawa tanggung jawab baru untuk membangun perusahaan yang adaptif, kolaboratif, dan mampu menciptakan nilai dalam jangka panjang. Kami meyakini bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan bertumpu pada kemampuan tata kelola perusahaan yang baik, kolaborasi strategis, dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni," tutup Saskia. **(GG)**

Meski Berat, Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran

Jakarta, InvestorDailyOnline.com - Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).



BPMI Setpres

Gibran Resmi Mundur

Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Presiden Prabowo memeluk Gibran usai resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI.

Oleh: **Heri Gagarin**

"Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Presiden dalam keterangan persnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet RI.

Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.

Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

"Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," tutur Presiden.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk menentukan wakil presiden baru.

"Kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah pengunduran diri untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Mas Gibran," ujar Muzani di hadapan wartawan usai menerima surat pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Wapres Gibran datang menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai wapres.

Muzani mengungkapkan, pertemuan tersebut berlangsung 20 menit. "Dalam pertemuan itu Mas Gibran menyampaikan maksud dan kedatangannya kepada pimpinan untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai wakil presiden," katanya.

Surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Mas Gibran, lanjut Muzani, meminta agar surat tersebut segera diproses.

"Dan hari ini, pimpinan majelis langsung akan mengadakan rapat gabungan yang diikuti pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menentukan langkah berikutnya," kata Muzani seraya menyatakan bahwa moment ini menjadi peristiwa praktik ketatanegaraan baru bagi bangsa Indonesia.

Terkait batas waktu Presiden Prabowo menyetorkan nama calon wapresnya, Muzani menjelaskan, batas waktu presiden adalah 14 hari setelah dikeluarkannya surat permintaan dari MPR.

"Batas waktu presiden menyetorkan dua nama wapres adalah 14 hari," ujarnya.

Sementara itu, di Solo, mantan Presiden RI yang juga ayah dari Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo mengatakan, meski Gibran mengundurkan diri, pihaknya tetap mendukung program pemerintahan Prabowo.

"Saya berpesan kepada Mas Gibran, bahwa jabatan itu hanyalah sementara. Kita terus mendukung Pemerintahan Presiden Prabowo terutama pada program yang berpihak kepada kepentingan banyak orang," ujar Jokowi di kediamannya. **(*)**

Rebalancing, BRPT dan BRMS Terdepak dari MSCI Global Standard Indeks

Jakarta, InvestorDailyOnline.com – Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) dikeluarkan dari MSCI Global Standard Indexes. Meski begitu, BRMS mengalami perpindahan kategori indeks, dari MSCI Global Standard ke MSCI Small Cap.

Hal tersebut disebutkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam pengumuman resmi perubahan komposisi saham dalam indeks MSCI Global Standard dan MSCI Small Cap untuk periode November 2026. Di saat bersamaan, MSCI memasukkan saham BRMS ke kategori saham MSCI Global Small Cap Indexes.



Dok. Indoline

Dengan rebalancing yang berlaku efektif 1 Desember 2026 tersebut, tujuh saham emiten Indonesia yang masuk dalam daftar MSCI Global Standard Indexes. Ketujuh saham itu adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Astra Internasional Tbk (ASII), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT United Tractors Tbk (UNTR)

Selain BRPT dan BRMS, ada tujuh saham yang dikeluarkan dari MSCI Small Cap Indexes, masing-masing PT Avia Avian Tbk (AVIA), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Sementara, untuk MSCI Micro Cap Indexes, tidak terdapat perubahan komposisi, baik penambahan maupun penghapusan saham.

Kedepan, MSCI kembali menjadwalkan pengumuman evaluasi yang dilaksanakan pada 9 Februari 2027. **(AHM)**

— BUSINESS —

Indonesia Memimpin Profitabilitas Bank Digital di Asean



Sektor *digital financial services* di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Salah satu segmen dengan pertumbuhan tertinggi adalah *digital lending* atau pinjaman digital, yang meningkat 22% secara tahunan (*year on year*/yoy) pada 2026.

2

Penerbit : PT HG Smart Media SK Menteri Hukum Republik Indonesia AHU-A125584.AH.01.30.Tahun 2026 | Redaksi : INDOLINE, Indonesia Stock Exchange (IDX) Building/Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Level 23, SCBD, Jln. Jenderal Soedirman Kav. 52 - 53 Lot. 2, Jakarta

PELAKU PASAR BUTUH KEPASTIAN

Pemerintah Minta Penegakan Aturan Pasar Modal Dipercepat

Jakarta, InvestorDailyOnline.com - Pemerintah meminta percepatan reformasi pasar modal, terutama dalam penegakan aturan dan penguatan pengawasan, guna meningkatkan kualitas pasar modal serta menjaga kepercayaan investor.

"Kami berharap dan sudah kami sepakati bahwa diusahakan akan dipercepat. Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat,"kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Disampaikan, pemerintah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat penegakan aturan, termasuk penindakan terhadap pelanggaran di pasar modal. Hal tersebut, lanjut Dradjad, menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan konsultatif yang melibatkan BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), asosiasi pasar modal, dan OJK.

Dirinya menilai, reformasi yang telah berjalan, termasuk dalam aspek transparansi, likuiditas, dan pengawasan, menunjukkan perkembangan. Namun, tindak lanjut atas keputusan pengawasan perlu dipercepat agar penegakan aturan berjalan lebih efektif.

Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan nilai perusahaan tercatat melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi penggunaan modal. Pemerintah juga meminta masukan mengenai kebijakan ekonomi riil, seperti perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau, yang dapat mendukung peningkatan valuasi emiten.

Dradjad turut menyoroti pentingnya edukasi pasar keuangan bagi masyarakat. Menurut dia, sekitar 15% penduduk usia produktif telah berpartisipasi di pasar modal dan pasar keuangan. Disampaikannya, reformasi pasar modal menjadi penting karena pasar modal tidak hanya menjadi sarana bagi emiten untuk memperoleh pembiayaan, tetapi juga menjadi tempat masyarakat berinvestasi.

Oleh karenanya, pergerakan pasar turut mempengaruhi aset masyarakat yang telah berinvestasi. "Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya," kata dia.

Selain itu, Dradjad meminta investor tidak panik menyikapi dinamika politik dalam negeri, termasuk pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, karena pemerintah menilai pasar keuangan nasional cukup kuat menghadapi situasi tersebut. Dinamika politik, menurutnya, merupakan hal yang biasa terjadi dan umumnya hanya berlangsung dalam waktu singkat, sehingga tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh pelaku pasar.

"Saya sudah cukup lama di politik sejak 2004. Jadi, sudah sering mengalami dinamika seperti ini, jadi enggak usah terlalu panik dengan dinamika politik,"ungkapnya.

Diakuinya, dinamika politik memang dapat memicu reaksi pasar dalam jangka pendek, baik dalam hitungan satu hingga dua jam maupun satu hingga dua hari. Namun, kondisi tersebut diyakini tidak akan mengganggu fundamental perekonomian nasional.

Sementara itu, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas pasar secara menyeluruh, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penyedia indeks global.

Dirinya menyebut pendalaman pasar perlu dilakukan dengan memperluas partisipasi investor institusi domestik maupun asing, serta meningkatkan kualitas instrumen investasi dan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan. **(AHM)**

DUKUNG KELANCARAN PELUNASAN HAJI 10 NOV-10 DESEMBER 2026

BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

Jakarta, InvestorDailyOnline.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat kesiapan jaringan layanan dan infrastruktur digital untuk mendukung kelancaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi calon jemaah haji Indonesia tahun 1448 H/2027 M. Melalui optimalisasi seluruh kanal layanan, mulai dari jaringan kantor cabang, BYOND by BSI hingga lebih dari 135 ribu BSI Agen, BSI berkomitmen menghadirkan proses pelunasan yang mudah, cepat, aman, dan menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah di Indonesia.



Dok.BSI

Optimalkan Semua Channel, BSI Siap Layani Jamaah untuk Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahap I Pada 10 Nov-10 Desember 2026

Direktur Sales & Distribution BSI Bapak Anton Sukarna (kiri) didampingi Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji & Umrah Nurchalis (tengah), dan SEVP Funding & Transaction BSI Ida Triana Widowati (kanan) di Jakarta, Kamis (12/11/2026). PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat kesiapan jaringan layanan dan infrastruktur digital untuk mendukung kelancaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi calon jemaah haji Indonesia tahun 1448 H/2027 M. Melalui optimalisasi seluruh kanal layanan, mulai dari jaringan kantor cabang, BYOND by BSI hingga lebih dari 135 ribu BSI Agen, BSI berkomitmen menghadirkan proses pelunasan yang mudah, cepat, aman, dan menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah membuka pelunasan Bipih reguler tahap pertama pada 10 November - 10 Desember 2026. Sementara itu, tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 16–31 Desember 2026. Menyambut periode tersebut, BSI memastikan kesiapan seluruh infrastruktur transaksi dan sumber daya layanan untuk memberikan pengalaman pelunasan yang nyaman bagi calon tamu Allah, baik melalui kanal digital maupun layanan tatap muka.

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia sekaligus salah satu bank dengan basis nasabah haji terbesar secara nasional, BSI memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan optimal bagi calon jemaah dalam mempersiapkan perjalanan ibadahnya. Hal ini didukung oleh luasnya jaringan layanan serta kapabilitas digital yang terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"BSI ingin memastikan proses pelunasan haji dapat dilakukan dengan mudah, nyaman, dan aman oleh seluruh calon jemaah. Kami mengoptimalkan seluruh kanal layanan agar masyarakat memiliki pilihan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Saat ini, sekitar 8 dari 10 calon jemaah haji reguler yang berhak melunasi merupakan nasabah BSI. Ini menjadi amanah sekaligus komitmen bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon tamu Allah," ujar Anton.

Berdasarkan data nasabah Tabungan Haji BSI, sebanyak 162.712 calon jemaah reguler (80% dari total kuota nasional sebesar 203 ribu) dan 9.844 jemaah haji khusus tercatat berhak melakukan pelunasan tahap pertama. Jumlah tersebut mencerminkan besarnya kontribusi BSI dalam mendukung ekosistem penyelenggaraan ibadah haji nasional. Dari sisi sebaran wilayah, calon jemaah yang berhak melunasi paling banyak berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Untuk memberikan kemudahan, calon jemaah dapat melakukan pelunasan secara digital melalui aplikasi BYOND by BSI tanpa harus datang ke kantor cabang. Prosesnya cukup dengan login ke aplikasi BYOND by BSI, pilih menu Portofolio > Tabungan Haji > Pelunasan Haji. Nasabah selanjutnya memilih rekening sumber pembayaran, memasukkan nomor porsi, mengonfirmasi kesesuaian data, dan memasukkan PIN transaksi. Setelah pembayaran berhasil, nasabah akan memperoleh resi sebagai bukti pelunasan.

Bagi calon jemaah yang membutuhkan pendampingan secara langsung, BSI juga mengoptimalkan jaringan kantor cabang dan BSI Agen yang tersebar di berbagai wilayah. Kehadiran BSI Agen menjadi salah satu upaya memperluas akses layanan perbankan syariah, terutama bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor cabang. Dengan demikian, calon jemaah memiliki alternatif kanal pembayaran yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

Selain kesiapan kanal pembayaran, BSI terus memperkuat edukasi kepada nasabah mengenai jadwal pelunasan, persyaratan administrasi, dan kesiapan dokumen melalui media sosial, *website* resmi, BSI Call 14040, serta informasi di kantor cabang. Calon jemaah juga diimbau memperhatikan persyaratan istitaah kesehatan sesuai ketentuan pemerintah sebelum melakukan pelunasan, di antaranya terdapat keharusan memiliki surat keterangan istithaah.

BSI turut memastikan keandalan sistem dan keamanan transaksi digital selama periode pelunasan untuk menjaga perlindungan dana serta data nasabah. Tidak hanya memfasilitasi pembayaran Bipih, BSI juga mengedukasi calon jemaah untuk mempersiapkan kebutuhan transaksi selama berada di Tanah Suci melalui Kartu Debit BSI Mabrur dan BSI Hasanah Card. Kedua instrumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk transaksi pembayaran maupun penarikan uang tunai di jaringan ATM yang tersedia di Arab Saudi, sehingga jemaah dapat bertransaksi lebih praktis tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tahapan pelunasan Bipih secara terukur agar proses keberangkatan jemaah haji Indonesia dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi jemaah. Tahun ini, kuota haji Indonesia mencapai 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

"Kami mengimbau jemaah yang telah masuk dalam alokasi kuota untuk memperhatikan persyaratan dan jadwal pelunasan serta tidak menunda proses pembayaran. Dukungan perbankan, termasuk BSI, menjadi bagian penting dalam memastikan proses pelunasan dapat berlangsung mudah, aman, dan nyaman bagi jemaah," ujar Nurchalis.

Melalui penguatan jaringan layanan fisik dan digital, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan layanan keuangan haji yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Bagi BSI, pelayanan haji bukan hanya tentang memfasilitasi transaksi pelunasan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan spiritual masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui pendampingan layanan keuangan sejak tahap persiapan, keberangkatan, hingga jemaah menjalankan ibadah di Tanah Suci, sejalan dengan semangat BSI Melayani Sepenuh Hati.

Berdasarkan ketentuan pemerintah, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp98.466.351 per Jemaah. Sementara itu, besaran Bipih yang harus dibayarkan oleh masing-masing jemaah berbeda sesuai embarkasi keberangkatan. Nilai pelunasan merupakan selisih antara besaran Bipih sesuai embarkasi dengan setoran awal sebesar Rp25 juta yang telah dibayarkan sebelumnya.

Berikut rincian Bipih reguler berdasarkan embarkasi:

1. Embarkasi Aceh: Rp43.695.779
2. Embarkasi Medan: Rp44.020.279
3. Embarkasi Padang: Rp44.148.779
4. Embarkasi Balikpapan:Rp49.891.779
5. Embarkasi Banjarmasin:Rp50.128.779
6. Embarkasi Lombok: Rp50.366.779
7. Embarkasi Batam: Rp51.531.279
8. Embarkasi Palembang: Rp52.161.279
9. Embarkasi Solo dan Yogyakarta: Rp52.710.779
10. Embarkasi Jakarta: Rp53.543.779
11. Embarkasi Kertajati: Rp55.101.279
12. Embarkasi Makassar: Rp55.428.465
13. Embarkasi Surabaya dan Dhoho: Rp58.146.279

(GG)

Investasi SBN Ritel ST017 Makin Mudah melalui wondr by BNI, Imbal Hasil Minimal 7,05%

Jakarta, InvestorDailyOnline.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memperluas akses masyarakat untuk berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui aplikasi wondr by BNI. Kali ini, nasabah dapat berinvestasi pada Sukuk Tabungan seri ST017 yang menjadi seri terakhir penerbitan SBN Ritel pada 2026.

Masa penawaran ST017 berlangsung mulai 6 November hingga 2 Desember 2026. Instrumen investasi syariah yang diterbitkan pemerintah tersebut hadir dalam dua pilihan seri, yakni ST017T2 dengan tenor 2 tahun dan ST017T4 dengan tenor 4 tahun.

ST017T2 menawarkan imbal hasil minimal 6,95% per tahun atau BI Rate ditambah spread 1,20%, sedangkan ST017T4 menawarkan imbal hasil minimal 7,05% per tahun atau BI Rate ditambah spread 1,30%. Imbal hasil tersebut dikenakan pajak 10%.

ST017 menggunakan skema imbal hasil mengambang dengan batas minimal (floating with floor) yang mengacu pada BI Rate. Apabila BI *Rate* meningkat, imbal hasil ST017 akan disesuaikan naik sesuai jadwal penyesuaian.

Sebaliknya, apabila BI Rate menurun, imbal hasil ST017 tidak akan lebih rendah dari tingkat minimal yang telah ditetapkan pada awal masa penawaran. Penyesuaian imbal hasil dilakukan setiap tiga bulan.

SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan, ST017 menjadi kesempatan terakhir pada tahun ini bagi masyarakat untuk memulai maupun melanjutkan investasi melalui instrumen SBN Ritel di pasar perdana.

"ST017 dapat menjadi salah satu pilihan investasi bagi nasabah dengan imbal hasil yang dibayarkan setiap bulan. BNI juga terus mengoptimalkan layanan digital agar proses investasi dapat dilakukan dengan semakin mudah," ujar Steven dalam keterangan tertulis.

Nasabah dapat melakukan pemesanan ST017 melalui aplikasi wondr by BNI dengan memastikan aplikasi telah menggunakan versi terbaru serta data dan akun investasi telah aktif. Selanjutnya, nasabah dapat memilih seri ST017 sesuai kebutuhan dan tujuan keuangan masing-masing selama periode penawaran.



Dok. Indoline

Melalui wondr by BNI, BNI terus memperluas kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai instrumen investasi melalui layanan digital.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya BNI dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat dapat mengenal serta memanfaatkan produk investasi sesuai kebutuhan dan tujuan keuangannya.

Aplikasi wondr by BNI dapat diunduh melalui *App Store* dan *Google Play Store*. Informasi lebih lanjut mengenai layanan wondr by BNI dapat diakses melalui wondr.bni.co.id.

Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, BNI terus memperkuat transformasi layanan keuangan dan kapabilitas digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan perbankan.

Memasuki delapan dekade perjalanan, BNI terus menghadirkan layanan yang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, termasuk memperluas akses terhadap instrumen investasi melalui kanal digital dengan semangat Swadharma Bhakti Nagara dan Melayani Sepenuh Hati. **(AHM)**

INDOLINE
Portalnya Dunia Usaha
www.INvestorDailyOnLINE.com
JUMAT, 13 NOVEMBER 2026

POWR Bagikan Dividen Rp502,93 M



Dok Listrindo

Ilustrasi foto.

Jakarta, InvestorDailyOnline.com - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) berencana bagikan dividen tunai interim tahun buku 2026 sebesar Rp502,93 miliar. Emiten penyedia tenaga listrik ini akan membagikan dividen tersebut kepada para pemegang saham pada 11 Desember 2026. Keputusan pembagian dividen interim tersebut telah disetujui melalui rapat bersama dewan komisaris dan direksi POWR pada 11 November 2026.

Rani Maheswari, Sekretaris Perusahaan POWR dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (12/11) menyampaikan, perseroan menetapkan total dividen interim sebesar US$27,85 juta atau setara Rp502,928 miliar. Dana pembagian dividen tersebut berasal dari saldo laba ditahan perseroan.

"Adapun dividen interim yang akan diterima pemegang saham ditetapkan sebesar Rp31,27 per saham," katanya.

POWR akan membayarkan dividen dalam mata uang rupiah. Nilai konversinya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal keputusan rapat, 11 November 2026, sebesar Rp18.059 per dolar AS. Jumlah dividen yang dibayarkan kepada seluruh pemegang saham juga akan memperhitungkan saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*) yang dimiliki perseroan pada tanggal pembayaran dividen.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2026, POWR mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$70,92 juta. Pada periode yang sama, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai US$328,47 juta. Sementara itu, total ekuitas Perseroan tercatat sebesar US$749,89 juta.

Terkait jadwal pembagian dividen, tanggal cum dividen POWR di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 20 November 2026. Sementara itu, tanggal ex dividen di kedua pasar tersebut jatuh pada 23 November 2026. Selanjutnya, tanggal cum dividen di pasar tunai ditetapkan pada 24 November 2026. Adapun tanggal ex dividen di pasar tunai berlangsung pada 25 November 2026.

Tanggal daftar pemegang saham (*recording date*) yang berhak menerima dividen atau DPS ditetapkan pada 24 November 2026 pukul 16.15 WIB. Adapun pembayaran dividen interim POWR dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2026. Pembagian dividen interim ini menjadi salah satu bentuk distribusi keuntungan POWR kepada pemegang saham di tengah capaian laba bersih perseroan hingga kuartal III-2026. **(AHM)**



Dok. Indoline

HASIL *REVIEW* MSCI JADI PERHATIAN

Pasar Soroti Tantangan Pasar Saham Indonesia

Jakarta, InvestorDailyOnline.com - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai dampak MSCI *Index Review* November 2026 terhadap pasar saham domestik relatif terbatas. Meski perubahan komposisi indeks berpotensi memicu penyesuaian portofolio investor asing, perhatian pasar kini juga tertuju pada upaya reformasi pasar modal Indonesia untuk memperkuat transparansi dan memulihkan kepercayaan investor global.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto dalam siaran persnya di Jakarta, menilai, dampak MSCI Index Review November 2026 relatif terbatas, meski MSCI menurunkan status BRMS ke MSCI Small Cap Index dan menghapus BRPT dari MSCI Global Standard Index dengan estimasi passive outflow Rp1,2 triliun.

Risiko penghapusan BRPT dinilai telah tercermin dalam harga saham, tetapi risiko reklasifikasi Indonesia menjadi Standalone Market masih perlu dicermati,"Dampak rebalancing MSCI November ini relatif terbatas, terutama karena risiko penghapusan BRPT sebagian besar telah tercermin dalam harga saham. Namun, review ini belum mengubah risiko reklasifikasi Indonesia menjadi Standalone Market. Pemulihan pasar yang berkelanjutan masih membutuhkan partisipasi investor asing yang lebih kuat serta kemajuan nyata dalam transparansi pasar," ujar Rully.

Di sisi lain, perkembangan pasar global menunjukkan perbaikan. Wall Street mengalami rebound pada perdagangan sebelumnya, dengan Nasdaq menguat 1,60% dan S&P 500 naik 1,31%. Rully tetap berpandangan selektif dengan prospek pasar domestik yang mulai lebih konstruktif, meski pemulihan berkelanjutan masih membutuhkan dukungan aliran dana asing yang lebih kuat.

Selain itu, Rully menilai reformasi pasar modal, termasuk langkah BEI dalam meningkatkan transparansi struktur kepemilikan dan kualitas indeks, menjadi faktor penting dalam memperbaiki persepsi investor global. Menurutnya, penilaian MSCI juga akan mempertimbangkan efektivitas implementasi reformasi secara keseluruhan.



Rully Arya Wisnubroto
Head of Research
& Chief Economist Mirae Asset
Sekuritas Indonesia

"Penilaian MSCI tidak hanya bergantung pada keberadaan daftar *High Shareholding Concentration* (HSC), tetapi juga efektivitas implementasi reformasi secara keseluruhan. Peningkatan transparansi kepemilikan, perbaikan distribusi saham publik, serta konsistensi pengawasan dan penegakan aturan akan menjadi fondasi penting bagi pemulihan kepercayaan investor global," jelas Rully.

Rully juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan OJK dan BEI sebagai bagian dari upaya memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia. Meski pemulihan kepercayaan investor membutuhkan waktu, konsistensi reformasi dinilai menjadi fondasi penting bagi perbaikan persepsi investor dan penilaian MSCI terhadap pasar Indonesia ke depan.

Sementara itu, *Research Analyst* PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Wilbert Arifin, memperbarui estimasi *passive outflow* pada saham BRMS dan BRPT setelah hasil resmi MSCI Index Review diumumkan. Dengan menggunakan asumsi harga saham per 12 November 2026, potensi outflow BRMS diperkirakan mencapai Rp280 miliar, sedangkan BRPT sekitar Rp700 miliar. Estimasi tersebut masih sejalan secara skala dengan proyeksi sebelumnya, meski terdapat penyesuaian akibat perubahan harga saham,

"Dengan menggunakan asumsi harga saham saat ini, estimasi passive outflow BRMS berada di kisaran Rp280 miliar dan BRPT sekitar Rp700 miliar. Perubahan estimasi tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga saham," ujar Wilbert.

Selain BRMS dan BRPT, penghapusan tujuh saham Indonesia dari MSCI Small Cap Index juga berpotensi memicu *foreign outflow*, meski dalam skala yang lebih kecil, dengan rata-rata di bawah Rp100 miliar. Wilbert menilai tekanan terhadap harga saham-saham tersebut tetap berpotensi terjadi, tetapi besarnya dampak akan bergantung pada kemampuan pasar dalam menyerap aliran dana keluar tersebut.

Terkait waktu tekanan jual, Wilbert memperkirakan penyesuaian oleh passive fund akan terkonsentrasi pada 30 November 2026 setelah perdagangan berakhir, menjelang tanggal efektif perubahan komposisi indeks pada 1 Desember 2026. Namun, sebagian aliran dana keluar dari active fund berpotensi terjadi secara bertahap sebelum tanggal tersebut.

Lebih lanjut, Wilbert menilai risiko reklasifikasi Indonesia menjadi Standalone Market masih berpengaruh terhadap keputusan investasi asing. Persepsi risiko pasar akan memengaruhi besarnya minat dan permintaan investor asing terhadap saham Indonesia, sekaligus menjadi pertimbangan dalam menentukan valuasi dan tingkat imbal hasil yang disyaratkan investor,"Risiko reklasifikasi tersebut tentunya masih sangat memengaruhi pasar, karena persepsi risiko akan tercermin dari besarnya permintaan investasi asing terhadap saham Indonesia. Hal ini juga dapat memengaruhi persepsi valuasi dan tingkat *return* yang disyaratkan oleh investor," jelas Wilbert**. (AHM)**

OUTLOOK SURAT UTANG KORPORASI 2027

Pefindo Taksir Nilainya Capai Rp147,65 Triliun

Jakarta, InvestorDaily-Online.com - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan penerbitan surat utang korporasi pada 2027 mencapai Rp147,65 triliun sampai Rp189,23 triliun, dengan titik tengah di sekitar Rp170,23 triliun. Sedangkan, nilai jatuh tempo surat utang korporasi pada 2027 ditaksir mencapai Rp178,13 triliun. Hal tersebut disampaikan *Rating Director* Pefindo, Hendro Utomo di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun depan kebutuhan refinancing tetap menjadi salah satu penopang penerbitan surat utang baru.

"Peluang utama untuk penerbitan tahun 2027 berasal dari meningkatnya kebutuhan refinancing disertai kebutuhan modal kerja dan investasi sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi," kata Hendro.

Peluang lainnya datang dari sisi permintaan, di mana perbaikan sentimen pasar dan masuknya arus modal asing berpotensi memperkuat penyerapan obligasi apabila tekanan suku bunga dan rupiah mulai meredah. Selain itu, perluasan investasi perbankan pada obligasi korporasi dan pemanfaatannya sebagai agunan repo juga dapat meningkatkan likuiditas serta memperluas basis investor.

Di sisi lain, tantangan utama penerbitan surat utang antara lain adalah risiko yield global dan domestik yang tetap tinggi sehingga membatasi ruang penurunan biaya penerbitan. Hendro menjelaskan bahwa The Fed kemungkinan akan kembali menaikkan suku bunga acuan pada Desember 2026, serta akan mempertahankan pengetatan moneter hingga 2027 akibat inflasi yang sulit ditekan.

Di saat yang sama, tingkat utang pemerintah global terus meningkat membuat suplai surat utang di pasar obligasi global juga ikut terdorong naik.

"Dan kami melihat akibatnya arah yield di level global juga akan tetap terjaga pada level yang tinggi di 2027. Kondisi ini akan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kebutuhan pembiayaan oleh pemerintah yang besar, serta imbal hasil SRBI yang kompetitif juga meningkatkan persaingan memperoleh dana investor. Pada saat yang sama, stabilnya suku bunga kredit perbankan di tengah kenaikan *yield* obligasi dapat mengurangi daya saing pendanaan melalui pasa surat utang terutama bagi yang perinkatnya rendah.

Terakhir, Hendro mencatat tekanan pada pasar saham di tengah reklasifikasi MSCI berisiko memicu arus keluar modal asing yang pada gilirannya juga berimbas bagi pasar surat utang domestik."Risiko perubahan sentimen investor terhadap aset di Indonesia juga perlu diperhatikan karena tekanan pada arus modal dan rupiah dapat memengaruhi premi risiko serta biaya pendanaan," ungkapnya. **(AHM)**